



Waskito Hadi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat
waskito.hadi.ca@gmail.com



THE INFLUENCE OF EARNING PERFORMANCE AND PROPORTION OF OWN-SOURCE REVENUE (PAD) OF 2015 LOCAL GOVERNANCE FINANCIAL STATEMENT (LKPD) TO THE REGIONAL AUTONOMY IN CENTRAL JAVA

PENGARUH EARNING PERFORMANCE DAN PROPORSI PAD LKPD 2015 TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DI JAWA TENGAH

ABSTRACT/ABSTRAK

The study was conducted using secondary data of local government financial statement for the budget year of 2015 in Central Java, which was aimed to find out the influence of earning performance and proportion PAD towards regional autonomy utilizing path analysis with census data partially and simultaneously. The population of this study are 36 LKPD for the budget year of 2015 audited by Supreme Audit Board of Indonesia Representatives Office in Central Java Province. Using SPSS version 15.0, the results showed that the influence of earning performance towards regional autonomy was 3,1% and the proportion PAD influence towards regional autonomy was strong with the percentage 82,4%. Simultaneous influence of earning performance and proportion PAD towards regional autonomy was 89,7%, that showed with determination coefficient value of 0,897, whereas the percentage of influence of other variables towards regional autonomy (ϵ) was 10,3%. The study concluded that earning performance and proportion PAD have influenced towards regional autonomy either simultaneously or partially.

Penelitian dilakukan dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh *earning performance* dan proporsi PAD terhadap kemandirian daerah baik secara parsial maupun simultan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan metode sensus. Populasi penelitian sebanyak 36 LKPD TA 2015 di Jawa Tengah yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi/kota/kabupaten di Jawa Tengah. Seluruh elemen populasi diteliti dan menjadi sasaran akhir populasi dalam penelitian. Hasil analisis data dengan SPSS versi 15.0 menunjukkan bahwa *earning performance* mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 3,1% dan besar pengaruh proporsi PAD terhadap kemandirian daerah adalah sebesar 82,4%. *Earning performance* dan proporsi PAD secara simultan mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 89,7% yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,897 sedangkan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini dapat mempengaruhi kemandirian daerah (ϵ).

KEYWORDS:

earning performance; PAD proportion; regional autonomy.

KATA KUNCI:

earning performance; proporsi PAD; kemandirian daerah.

SEJARAH ARTIKEL:

Diterima pertama: Januari 2017

Dinyatakan dapat dimuat : Juni 2017

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah terobosan hasil reformasi setelah mampu meluluhlantakkan kekuasaan orde baru yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah guna menyelenggarakan semua urusan pemerintahannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini berkat dukungan regulasi berupa paket undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kini telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah terbit penggantinya yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain didukung dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensinya setiap pemerintah daerah berkewajiban menaikkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat secara adil, demokratis, dan merata serta berkesinambungan. Pemerintah daerah harus dapat mengelola semua potensi daerah yang meliputi sumber daya alam, manusia dan keuangan secara optimal. Potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah tersebut harus sejalan dengan semangat terwujudnya *good governance*, yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang bertanggungjawab dan solid serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politik dengan mempraktikkan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha yang seluas luasnya.

Upaya mewujudkan *good governance* tersebut memunculkan paket undang-undang keuangan negara guna mengatur pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang terdiri UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi selanjutnya adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Setiap tahun anggaran pemerintah daerah menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa untuk memperoleh opini dari BPK RI. Sebagai gambaran, tabel 1 menyajikan opini atas LKPD di Jawa Tengah yang diberikan BPK RI dalam kurun waktu enam Tahun Anggaran (TA) yakni TA 2010 hingga TA 2015.

LKPD *audited* BPK RI tersebut dapat dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah sebagai cita-cita luhur otonomi daerah, yakni seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Astuti & Haryanto (2006) menyatakan bahwa otonomi daerah memiliki filosofi untuk mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan yang diukur menggunakan unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harapan otonomi adalah mampu melaksanakan pembangunan dan semua urusan pemerintahan yang bertumpu pada PAD di masing-masing daerah di Indonesia.

Tabel 1. Daftar Opini LKPD di Jawa Tengah Selama Enam Tahun Anggaran (TA 2010 – TA 2015)

No	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPINI LKPD					
		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
1	Provinsi Jawa Tengah	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
2	Kabupaten Banjarnegara	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Banyumas	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
4	Kabupaten Batang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kabupaten Blora	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
6	Kabupaten Boyolali	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kabupaten Cilacap	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kabupaten Demak	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kabupaten Grobogan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
11	Kabupaten Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
12	Kabupaten Karanganyar	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
13	Kabupaten Kebumen	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
14	Kabupaten Kendal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	Kabupaten Klaten	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
16	Kabupaten Kudus	WDP	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
17	Kabupaten Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
18	Kabupaten Pati	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
19	Kabupaten Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
20	Kabupaten Pemalang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kabupaten Purbalingga	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
22	Kabupaten Purworejo	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kabupaten Rembang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
24	Kabupaten Semarang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kabupaten Sragen	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
26	Kabupaten Sukoharjo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
27	Kabupaten Tegal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
28	Kabupaten Temanggung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
29	Kabupaten Wonogiri	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
30	Kabupaten Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
31	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
32	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
33	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
34	Kota Semarang	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP
35	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	Kota Tegal	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2010, IHPS I 2011, IHPS I 2012, IHPS I 2013, IHPS I 2014, IHPS I 2015 (BPK 2011, BPK 2012, BPK 2013, BPK 2014, BPK 2015, BPK 2016a)

Keterangan Jenis Opini LKPD :

- WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
- WTP-DPP = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
- WDP = Wajar Dengan Pengecualian
- TMP = Tidak Memberikan Pendapat
- TW = Tidak Wajar

Tetapi tujuan mulia tersebut tampaknya masih jauh dari harapan. Kemandirian belum dapat dicapai karena pencapaian PAD yang masih relatif rendah sehingga ketergantungan terhadap pusat masih besar. Tabel 2 menyajikan

perbandingan proporsi PAD yang cenderung lebih rendah dari proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan di Jawa Tengah berdasarkan LKPD *audited* TA 2015.

Tabel 2. Proporsi PAD dan DAU Terhadap Total Pendapatan TA 2015

No	Entitas Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	Proporsi PAD	Proporsi DAU
1	Provinsi Jawa Tengah	64,80%	9,68%
2	Kabupaten Banjarnegara	10,66%	50,95%
3	Kabupaten Banyumas	18,92%	48,14%
4	Kabupaten Batang	12,87%	50,62%
5	Kabupaten Blora	9,49%	51,48%
6	Kabupaten Boyolali	13,45%	49,97%
7	Kabupaten Brebes	12,49%	51,06%
8	Kabupaten Cilacap	14,97%	48,68%
9	Kabupaten Demak	14,23%	46,62%
10	Kabupaten Grobogan	13,52%	50,01%
11	Kabupaten Jepara	14,00%	48,46%
12	Kabupaten Karanganyar	13,93%	49,42%
13	Kabupaten Kebumen	10,54%	49,27%
14	Kabupaten Kendal	13,92%	51,43%
15	Kabupaten Klaten	8,75%	53,46%
16	Kabupaten Kudus	14,54%	44,71%
17	Kabupaten Magelang	13,44%	51,19%
18	Kabupaten Pati	14,21%	49,81%
19	Kabupaten Pekalongan	14,82%	50,78%
20	Kabupaten Pemalang	11,72%	53,85%
21	Kabupaten Purbalingga	13,76%	51,37%
22	Kabupaten Purworejo	12,70%	47,52%
23	Kabupaten Rembang	13,71%	51,32%
24	Kabupaten Semarang	16,63%	52,27%
25	Kabupaten Sragen	13,23%	48,29%
26	Kabupaten Sukoharjo	17,60%	47,89%
27	Kabupaten Tegal	14,50%	51,76%
28	Kabupaten Temanggung	14,46%	49,80%
29	Kabupaten Wonogiri	10,76%	52,52%
30	Kabupaten Wonosobo	12,75%	52,26%
31	Kota Magelang	23,89%	53,53%
32	Kota Pekalongan	18,78%	52,01%
33	Kota Salatiga	22,25%	53,32%
34	Kota Semarang	35,90%	33,67%

No	Entitas Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	Proporsi PAD	Proporsi DAU
35	Kota Surakarta	23,77%	45,48%
36	Kota Tegal	28,67%	42,83%
Rata - rata se-Jawa Tengah		16,91%	48,48%

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemda se-Jawa Tengah audited BPK 2015 dianalisis (BPK 2016b, BPK 2016c, BPK 2016d, BPK 2016e, BPK 2016f, BPK 2016g, BPK 2016h, BPK 2016i, BPK 2016j, BPK 2016k, BPK 2016l, BPK 2016m, BPK 2016n, BPK 2016o, BPK 2016p, BPK 2016q, BPK 2016r, BPK 2016s, BPK 2016t, BPK 2016u, BPK 2016v, BPK 2016w, BPK 2016x, BPK 2016y, BPK 2016z, BPK 2016aa, BPK 2016bb, BPK 2016cc, BPK 2016dd, BPK 2016ee, BPK 2016ff, BPK 2016gg, BPK 2016hh, BPK 2016ii, BPK 2016jj, BPK 2016kk).

Salah satu analisis lainnya berdasarkan LKPD *audited* BPK RI adalah *earning performance*, yakni rasio tingkat pendapatan per aset yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki demi memperoleh pendapatan (Prasetya, 2005, p.52). Pengukuran kinerja keuangan dengan analisis rasio atas laporan keuangan pada sektor pemerintah berbeda dengan analisis keuangan pada sektor bisnis, hal ini sebabkan dalam kinerja pemerintah tidak terdapat “*net profit*” (istilahnya laba bersih). Analisis rasio yang berlaku bagi keuangan daerah sangat berbeda dengan analisis rasio pada perusahaan (bisnis) disebabkan karakteristik yang melekat kuat pada pemerintah daerah yaitu tidak digunakan untuk menghitung laba yang akan diperoleh (Prasetya, 2005, p.47).

Saat ini belum banyak penggunaan analisis rasio di sektor publik khususnya terhadap APBD, sehingga belum ada kesepakatan secara bulat mengenai kaidah dan nama pengukuran dalam teori-teori. Namun demikian, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang jujur, transparan, demokratis, efisien, efektif, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2001, p.127-130).

Kaitan logis antara *earning performance* dan proporsi PAD dengan kemandirian daerah terletak pada pengukuran tingkat pendapatan milik pemerintah daerah yaitu pendapatan yang dihasilkan pemerintah daerah guna

membiayai seluruh pembangunan serta segala urusan pemerintahan di suatu daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul “Pengaruh *Earning Performance* dan Proporsi PAD LKPD 2015 terhadap Kemandirian Daerah di Jawa Tengah”.

Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Rumusan identifikasi dan pembatasan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh *earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah di Jawa Tengah
- Apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh *earning performance* terhadap kemandirian daerah di Jawa Tengah; dan
- Apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh proporsi PAD terhadap kemandirian daerah di Jawa Tengah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan pembatasan permasalahan tersebut adalah untuk menguji secara empiris hal-hal sebagai berikut:

- Ada tidaknya dan besar pengaruh *earning performance* dan proporsi PAD secara

bersama-sama terhadap kemandirian daerah di Jawa Tengah;

- b. Ada tidaknya dan besar pengaruh *earning performance* terhadap kemandirian daerah di Jawa Tengah; dan
- c. Ada tidaknya dan besar pengaruh proporsi PAD terhadap kemandirian daerah di Jawa Tengah.

Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam segi keilmuan maupun dalam segi operasional sebagai berikut:

- a. Keilmuan
 Bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan pokok bahasan keuangan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah.
- b. Operasional
 Pertimbangan bagi entitas di pemerintahan dan pemeriksa BPK untuk mengembangkan analisis rasio keuangan guna mengukur kinerja keuangan di pemerintahan.

LANDASAN TEORI

Kesuksesan Sistem Informasi

Rasio *earning performance* mengindikasikan tingkat pendapatan per aset yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki demi memperoleh pendapatan (Prasetya, 2005, p.52). Rumus perhitungan rasio *earning performance* dapat dilihat sebagai berikut:

$$Earning\ Performance = \frac{Surplus\ (Pendapatan\ Belanja)}{Rata-rata\ Total\ Aset}$$

$$Rata-rata\ Total\ Aset = \frac{Aset\ Awal\ Tahun + Aset\ Akhir\ Tahun}{2}$$

Sedangkan proporsi PAD merupakan perbandingan jumlah PAD dengan jumlah keseluruhan pendapatan pemerintah daerah.

Kemandirian Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan kemandirian daerah. Kinerja keuangan merupakan suatu standar untuk menilai kemampuan lembaga pemerintah mendanai input dan sampai seberapa jauh lembaga pemerintahan mengikuti proses serta target yang telah ditentukan, tetapi sangat minim perhatian diberikan kepada pencapaian hasil akhir atau tujuan. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya lembaga pemerintahan dalam penyediaan dana dan sarana serta fasilitas program atau proyek, kepatuhan suatu lembaga terhadap berbagai aturan dan prosedur formal, dan perluasan jangkauan kelompok sasaran atau penerima program atau proyek (Keban, 2008). Selanjutnya, menurut Soepomo (2007) kinerja keuangan merupakan suatu aktivitas dalam suatu periode akuntansi terkait bagaimana pemerintah melaksanakan aktivitas keuangan dan bagaimana kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Pengukuran tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya menggunakan rasio kemandirian, yakni membandingkan jumlah PAD dengan jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain Utang Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan (PPN)/PPH dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)). DAU bersumber dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah guna pelaksanaan otonomi daerah, merupakan andalan atau sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah pada umumnya. Jika

perbandingan sumber pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin besar, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang juga semakin meningkat. Jika jumlah pinjaman dianggap material, maka unsur pinjaman tersebut harus diperhitungkan guna mengukur kemandirian. Namun demikian, Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebaiknya dikeluarkan dari unsur pinjaman sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pemerintah daerah (STAN, 2007, p.108). Perhitungan rasio kemandirian tersebut dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\{\text{DAU} + (\text{Utang-Utang PFK} - \text{Utang Pajak Pusat})\}}$$

Ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dapat tercermin dari rasio kemandirian. Makin tinggi rasio kemandirian mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal yakni dari pemerintah pusat dan atau provinsi semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal yakni dari pemerintah pusat dan atau provinsi semakin tinggi. Selanjutnya, semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD (Halim, 2007, p.233).

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim, 2001, p.168) menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya pelaksanaan undang-undang terkait perim-

banagan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif, adalah peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
- b. Pola hubungan konsultatif, adalah mulai berkurangnya campur tangan pemerintah pusat dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- c. Pola hubungan partisipatif, adalah pola dimana semakin berkurangnya peranan pemerintah pusat mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemerintah pusat beralih dari pemberian konsultasi menjadi peran partisipasi;
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu tidak adanya campur tangan pemerintah pusat karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pendelegasian otonomi keuangan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah pusat dengan penuh kesiapan dan keyakinan. Tabel 3 menunjukkan pola hubungan pemerintah daerah dan pusat serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3. Pola Hubungan, Rasio Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim (2001).

Hubungan antara *Earning Performance* dan Proporsi PAD dengan Kemandirian Daerah

Perhitungan rasio *earning performance* suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengindikasikan tingkat pendapatan per aset yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki demi memperoleh pendapatan. Sedangkan rasio kemandirian merupakan indikator pengukuran kemandirian daerah yang mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal tersebut adalah DAU dan juga unsur pinjaman yang harus ikut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat karena keduanya tidak menambah sumber pendanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara logika terdapat hubungan antara *earning performance* dan proporsi PAD dengan kemandirian daerah, jika dipandang dari sisi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh pemda. Semakin tinggi *earning performance* dan proporsi PAD berarti semakin naik tingkat kemandirian daerah. Kerangka teoritis tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu kerangka pemikiran dalam penulisan penelitian ini.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan kajian teoritis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh secara simultan rasio *earning performance* dan proporsi PAD terhadap rasio kemandirian daerah di Jawa Tengah;
- b. Terdapat pengaruh rasio *earning performance* terhadap rasio kemandirian daerah di Jawa Tengah; dan
- c. Terdapat pengaruh proporsi PAD terhadap rasio kemandirian daerah di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan terdiri sumber data, desain penelitian, populasi penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu berupa LKPD TA 2015 di Jawa Tengah yang telah diperiksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi/kota/kabupaten di Jawa Tengah. Sehingga menjadi dokumen publik yang secara umum dapat diakses oleh semua pihak (publik /masyarakat luas).

Desain Penelitian

Penelitian ini memiliki desain dengan menelaah enam aspek dasar, yaitu tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, konteks studi, unit analisis dan horizon waktu. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis investigasi penelitian ini adalah studi korelasional dengan berusaha melihat pengaruh *earning performance* dan proporsi PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini berkaitan dengan jenis investigasi yang dipilih berupa studi korelasional yang dilakukan dalam lingkungan alami organisasi dengan intervensi yang minimum oleh peneliti. Tingkat intervensi minimal adalah mempelajari peristiwa sebagaimana adanya. Konteks studi dalam penelitian ini juga berkaitan dengan jenis investigasi yang dipilih yakni studi korelasional. Studi korelasional selalu dilakukan dalam konteks studi atau dalam situasi yang tidak diatur.

Unit analisis penelitian merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap

analisis data selanjutnya. Tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data menggunakan unit analisis pada tingkat entitas organisasi pemerintahan daerah. Horizon waktu menggunakan pengumpulan data pada satu batas waktu yang disebut studi *cross-sectional* yaitu data berupa LKPD *audited* BPK RI pada beberapa entitas dikumpulkan secara sekaligus atau hanya sekali dikumpulkan.

Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah LKPD TA 2015 di Jawa Tengah yang telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi/kota/kabupaten di Jawa Tengah. Jumlah seluruhnya adalah 36 yang terdiri satu entitas provinsi, enam entitas kota dan 29 entitas kabupaten.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner dan observasi. Penulisan penelitian ini menggunakan metode observasi. Observasi yang digunakan adalah observasi mekanis, yakni dengan bantuan mesin untuk menyediakan data dengan catatan peristiwa tanpa kehadiran peneliti secara fisik pada objek penelitian. Observasi mekanis ini dilakukan dengan kunjungan pada portal internal BPK. Data yang diobservasi secara mekanis tersebut

bebas bias (Sekaran, 2006, p.107).

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penulisan penelitian ini adalah secara operasional mendefinisikan sebuah konsep agar dapat diukur, dan dapat dilihat pada tabel 4.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y) dengan menggunakan *standardized multiple regression model* (model regresi berganda yang distandarkan) (Li, 1975, p.108). Penggunaan model regresi berganda yang distandarkan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menguji pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y), namun juga mengetahui besarnya pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y), baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

Pengujian parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan pengujian simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode sensus, sehingga tidak dilakukan uji signifikansi, baik uji-t untuk pengaruh secara parsial maupun uji-F untuk

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
1	Kemandirian Daerah (Y)	Kemandirian daerah merupakan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya.	Rasio Kemandirian Daerah	Rasio
2	<i>Earning Performance</i> (X1)	<i>Earning Performance</i> merupakan tingkat pendapatan per aset yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki demi memperoleh pendapatan.	Rasio <i>Earning Performance</i>	Rasio
3	Proporsi PAD (X2)	Proporsi PAD merupakan perbandingan jumlah PAD dengan jumlah keseluruhan pendapatan pemerintah daerah.	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	Rasio

pengaruh secara bersama-sama. Kesimpulan diambil langsung dari nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen serta koefisien determinasi, baik secara parsial maupun secara bersama-sama (Arfan, 2006, p.143).

Model regresi berganda yang distandarkan dalam literatur juga dinamakan analisis jalur (*path analysis*) (Li, 1975, p.101). Analisis jalur merupakan analisis regresi yang menggunakan hubungan di antara variabel-variabel yang distandarkan (*standardized variables*) (Li, 1975, p.101). Model regresi berganda yang distandarkan dengan menggunakan analisis jalur dalam penelitian ini dapat diformulasikan melalui persamaan sebagai berikut:

$$Y = PYX_1X_1 + PYX_2X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kemandirian daerah (variabel dependen)
- PYX1 dan PYX2 = Koefisien regresi yang distandarkan (koefisien jalur)
- X1 = *Earning performance* (variable independen)
- X2 = Proporsi PAD (variable independen)
- ϵ = Variabel lain yang mempengaruhi Y

Pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y) ini dapat digambarkan dengan skema model struktur yang diilustrasikan pada gambar 1.

Pengujian hipotesis pertama (H1), yakni pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (HA) sebagai berikut:

HO1: $R^2 = 0$; *Earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

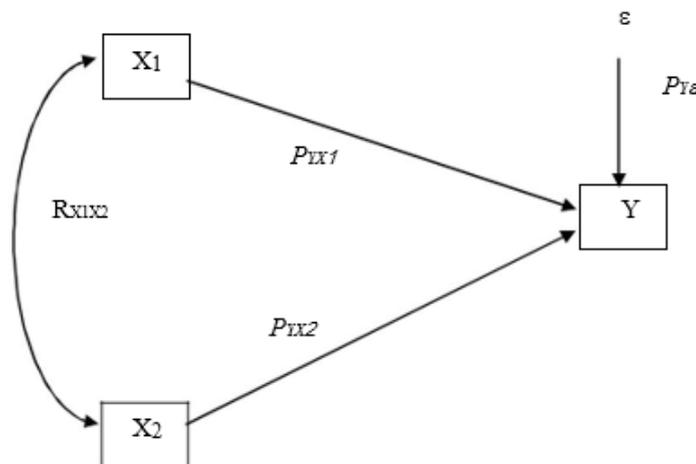
HA1: $R^2 \neq 0$; *Earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Jika $R^2 = 0$: Ho tidak dapat ditolak

Jika $R^2 \neq 0$: Ho ditolak



Gambar 1 : Skema Model Struktur Pengaruh *Earning Performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) terhadap Kemandirian Daerah (Y)

Ho tidak dapat ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan Ho ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Besar pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y) ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2 atau *R Square*). Nilai koefisien determinasi terletak pada interval $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 semakin mendekati 1 berarti semakin besar proporsi sumbangan variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika R^2 semakin mendekati nol berarti semakin kecil proporsi sumbangan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Pengujian pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_A).

Hipotesis kedua (H_2)

$H_{02} : PYX_1 = 0$; *earning performance* tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

$H_{A2} : PYX_1 \neq 0$; *earning performance* berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hipotesis ketiga (H_3)

$H_{03} : PYX_2 = 0$; Proporsi PAD tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

$H_{A3} : PYX_2 \neq 0$; Proporsi PAD berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

- 2) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Jika PYX_i ($i=1$ dan 2) = 0: Ho tidak dapat

ditolak

Jika PYX_i ($i=1$ dan 2) $\neq 0$: Ho ditolak

Ho tidak dapat ditolak berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan Ho ditolak artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Besar pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y) ditunjukkan oleh koefisien determinasi masing-masing variabel independen. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi masing-masing variabel dihitung dengan mengkuadratkan koefisien jalur masing-masing variabel independen tersebut (PYX_{i2}). Koefisien determinasi terletak dalam interval $0 \leq PYX_{i2} \leq 1$. Jika PYX_{i2} semakin mendekati 1 artinya semakin besar proporsi sumbangan variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika PYX_{i2} semakin mendekati 0 artinya makin kecil proporsi sumbangan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen diperoleh melalui bantuan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution* yang sebelumnya disebut *Statistical Package for the Social Sciences*) versi 15.0. Hasilnya dapat dilihat pada *output coefficients*, kolom *standardized coefficients (beta)*.

Penentuan besar pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (ϵ) dihitung dengan cara sebagai berikut (Loether & McTavish, 1993, p.331):

$$\epsilon = 1 - R^2$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan variabel penelitiannya yaitu *earning performance* (X1), proporsi PAD (X2) dan kemandirian daerah (Y). Semua

data yang dianalisis tersebut merupakan data sekunder dan menggunakan skala rasio. Sumber datanya adalah 36 LKPD TA 2015 di Jawa Tengah yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi/kota/kabupaten di Jawa Tengah.

Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan rasio *earning performance* yang digunakan dalam penulisan penelitian ini serta perhitungan rasio kemandirian daerah yang sekaligus menggambarkan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah serta tingkatan kemampuan keuangannya sebagaimana diklasifikasikan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard.

Tabel 5. Daftar Rasio *Earning Performance* dan Rasio Kemandirian Daerah, Pola Hubungan dan Tingkatan Kemandirian Keuangan Daerah

No	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Analysis of <i>Earning Performance</i>	Rasio Kemandirian TA 2015	Pola Hubungan	Kemandirian Keuangan Daerah
1	Provinsi Jawa Tengah	22,33%	473,54%	Delegatif	Tinggi
2	Kabupaten Banjarnegara	2,34%	20,72%	Instruktif	rendah sekali
3	Kabupaten Banyumas	8,89%	37,44%	Konsultatif	Rendah
4	Kabupaten Batang	1,40%	25,22%	Konsultatif	Rendah
5	Kabupaten Blora	-0,73%	18,20%	Instruktif	rendah sekali
6	Kabupaten Boyolali	10,93%	26,65%	Konsultatif	Rendah
7	Kabupaten Brebes	0,89%	24,14%	Instruktif	rendah sekali
8	Kabupaten Cilacap	2,08%	30,21%	Konsultatif	Rendah
9	Kabupaten Demak	6,00%	30,13%	Konsultatif	Rendah
10	Kabupaten Grobogan	14,03%	26,76%	Konsultatif	Rendah
11	Kabupaten Jepara	5,31%	27,93%	Konsultatif	Rendah
12	Kabupaten Karanganyar	7,38%	27,93%	Konsultatif	Rendah
13	Kabupaten Kebumen	8,41%	21,21%	Instruktif	rendah sekali
14	Kabupaten Kendal	0,96%	26,54%	Konsultatif	Rendah
15	Kabupaten Klaten	7,84%	16,31%	Instruktif	rendah sekali
16	Kabupaten Kudus	6,57%	32,01%	Konsultatif	Rendah
17	Kabupaten Magelang	6,83%	25,89%	Konsultatif	Rendah
18	Kabupaten Pati	12,12%	27,95%	Konsultatif	Rendah
19	Kabupaten Pekalongan	3,70%	28,62%	Konsultatif	Rendah
20	Kabupaten Pemasang	7,47%	21,57%	Instruktif	rendah sekali
21	Kabupaten Purbalingga	15,12%	26,33%	Konsultatif	Rendah
22	Kabupaten Purworejo	15,25%	26,47%	Konsultatif	Rendah
23	Kabupaten Rembang	23,31%	25,95%	Konsultatif	Rendah
24	Kabupaten Semarang	6,78%	31,07%	Konsultatif	Rendah
25	Kabupaten Sragen	5,89%	26,82%	Konsultatif	Rendah
26	Kabupaten Sukoharjo	9,10%	36,57%	Konsultatif	Rendah
27	Kabupaten Tegal	17,94%	26,26%	Konsultatif	Rendah
28	Kabupaten Temanggung	5,01%	25,30%	Konsultatif	Rendah
29	Kabupaten Wonogiri	8,76%	20,20%	Instruktif	rendah sekali
30	Kabupaten Wonosobo	5,70%	24,29%	Instruktif	rendah sekali

31	Kota Magelang	1,81%	44,44%	Konsultatif	Rendah
32	Kota Pekalongan	0,94%	35,42%	Konsultatif	Rendah
33	Kota Salatiga	4,69%	40,27%	Konsultatif	Rendah
34	Kota Semarang	0,76%	96,10%	Delegatif	Tinggi
35	Kota Surakarta	0,52%	49,25%	Konsultatif	Rendah
36	Kota Tegal	-0,66%	62,27%	Partisipatif	Sedang
Rata - rata se-Jawa Tengah		7,10%	43,50%	Konsultatif	Rendah

Sumber : Data Sekunder LHP LKPD audited BPK TA 2015 dianalisis.

Hasil Analisis Data

Penelitian ini menguji pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y) menggunakan analisis regresi berganda yang distandarkan atau analisis jalur dengan metode sensus. Sehingga untuk pengujian hipotesis tidak diperlukan uji signifikansi, baik uji-t (untuk pengaruh secara parsial) maupun uji-F (untuk pengaruh secara bersama-sama). Analisis jalur dalam metode sensus digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai koefisien jalur dan koefisien determinasi yang sesungguhnya (Arfan, 2006, p.151).

Guna menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen digunakan koefisien jalur, sedangkan untuk mengetahui besarnya atau kuat-lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara bersama-sama atau simultan ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan guna mengetahui seberapa besar (%) variabel independen, baik secara parsial maupun secara bersama-sama atau simultan dapat menentukan atau menjelaskan variasi variabel dependen.

Langkah awal untuk analisis data menggunakan uji statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Screening Normalitas Data

Screening terhadap normalitas data

merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis *multivariate* (Ghozali, 2011, p.29). Melalui aplikasi SPSS, *screening* normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *skewness* dan *kurtosis*, uji *kolmogorov-smirnov* serta uji normalitas grafik.

b. Transformasi Data

Setelah dilakukan *screening* normalitas data, sehingga diketahui data yang tidak terdistribusi secara normal, selanjutnya ditransformasikan sehingga menjadi data yang berdistribusi normal. Transformasi data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk transformasi SQRT atau akar kuadrat karena hasil grafik histogram menunjukkan bentuk *moderate positive skewness*.

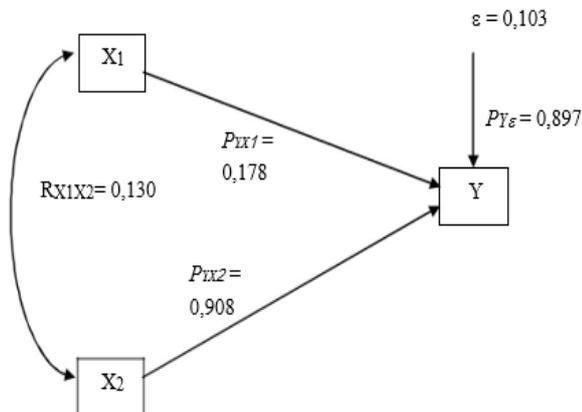
c. Data Outlier

Data *outlier* merupakan data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lain dan dapat terjadi karena salah satunya memang terdapat data-data ekstrim yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya (Santoso, 2002, p.23). Setelah *outlier* teridentifikasi dalam penelitian ini, maka tetap dipertahankan karena datanya merupakan representasi dari populasi yang diteliti. Hasil pengolahan data setelah dilakukan uji normalitas, transformasi data, dan identifikasi data *outlier* melalui aplikasi SPSS versi 15.0 secara singkat

diperoleh model persamaan struktural untuk diagram jalur sebagai berikut:

$$Y = 0,178X_1 - 0,908X_2 + \epsilon$$

Dengan skema model struktur analisis jalur sebagaimana ditunjukkan gambar 2.



Gambar 2 : Hasil Analisis Jalur Atas Pengaruh *Earning Performance* (X1) dan Proporsi PAD (X2) terhadap Kemandirian Daerah (Y).

Keterangan:

- Y = Kemandirian Daerah (variabel dependen)
- P_{YX1} dan P_{YX2} = Koefisien regresi yang distandarkan (koefisien jalur)
- X1 = *Earning Performance* (variabel independen)
- X2 = Proporsi PAD (variabel independen)
- ε = Variabel lain yang mempengaruhi Y
- = Pengaruh

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengaruh Simultan

Hipotesis pertama (H1), yaitu pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y), dirumuskan sebagai

berikut:

HO1: $R^2 = 0$; *Earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

HA1: $R^2 \neq 0$; *Earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil pengujian hipotesis melalui aplikasi SPSS versi 15.0 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) atau pada kolom *R Square* yakni pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y) adalah 0,897 atau tidak sama dengan nol ($R^2 \neq 0$). Berdasarkan hipotesis pertama (H1), kriteria untuk menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen adalah pada saat $R^2 \neq 0$. Hal ini berarti hipotesis nol pertama (HO1) ditolak, dan hipotesis alternatif pertama (HA1) tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, *earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari nilai R^2 atau *R Square* sebesar 89,7% berarti 89,7% variasi variabel dependen berupa kemandirian daerah ditentukan secara bersama-sama oleh variabel independen berupa *earning performance* dan proporsi PAD, sehingga pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-

Tabel 6 . Perhitungan Besar Pengaruh Simultan *Earning Performance* (X1) dan Proporsi PAD (X2) Terhadap Kemandirian Daerah (Y) Secara Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Jumlah
X1 ke Y	(0,178)² x 100%		3,1 %
X2 ke Y	(0,908)² x 100%		82,4 %
X1 ke Y melalui X2		2 (0,178 x 0,908 x 0,130) x 100%	4,2 %
Besar Pengaruh Secara Simultan :			89,7 %

Sumber : Hasil analisis statistik dengan SPSS.

sama terhadap kemandirian daerah (Y) adalah sebesar 89,7%.

Perhitungan besar pengaruh simultan tersebut diperoleh dengan memperhitungkan pengaruh langsung dan tidak langsungnya, karena terdapat hubungan antara variabel *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) yang ditunjukkan oleh angka *pearson correlation* sebesar 0,130. Tabel 6 menunjukkan perhitungan pengaruh langsung maupun tidak langsung antara *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara simultan terhadap kemandirian daerah (Y).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y), yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) atau *R square* tidak sama dengan 0 (nol), yakni 0,897 atau sebesar 89,7% yang berarti bahwa 89,7% variasi variabel dependen berupa kemandirian daerah ditentukan secara bersama - sama oleh variabel independen berupa *earning performance* dan proporsi PAD. Sehingga *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-sama mempengaruhi kemandirian daerah (Y) sebesar 89,7%.

Mengacu pada kerangka pemikiran logis tentang pengaruh *earning performance* dan proporsi PAD terhadap kemandirian daerah, apabila dilihat dari sisi jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan pemerintah daerah, maka dapat ditarik benang merah bahwa hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sejalan dan dapat mendukung teori yaitu terdapat pengaruh *earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengaruh Parsial X1 Terhadap Y

Hipotesis kedua (H2), yaitu pengaruh parsial *earning performance* (X1)

terhadap kemandirian daerah (Y), digambarkan pada rumus sebagai berikut:

HO2: $PYX_1 = 0$; *Earning performance* tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

HA2: $PYX_1 \neq 0$; *Earning performance* berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua melalui aplikasi SPSS versi 15.0 diketahui bahwa nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen ditunjukkan oleh *output coefficients* pada kolom *standardized coefficients* (beta). Nilai koefisien jalur pengaruh parsial *earning performance* (X1) terhadap kemandirian daerah (Y) adalah 0,178 atau tidak sama dengan nol ($PYX_1 \neq 0$).

Berdasarkan hipotesis kedua (H2) bahwa kriteria untuk menyatakan bahwa variabel independen berupa *earning performance* secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen berupa kemandirian daerah apabila $PYX_1 \neq 0$. Hal ini berarti hipotesis nol kedua (HO2) ditolak, dan hipotesis alternatif kedua (HA2) tidak dapat ditolak atau *not rejected*. Dengan kata lain, *earning performance* secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pengujian signifikansi terhadap nilai koefisien jalur tersebut tidak dilakukan, karena nilai koefisien jalur yang diperoleh sudah merupakan nilai koefisien jalur yang sesungguhnya dari populasi. Nilai koefisien jalur pengaruh parsial *earning performance* (X1) terhadap kemandirian daerah (Y) ditunjukkan pada kolom *standardized coefficients* (beta) yakni $PYX_1 = 0,178$.

Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini diketahui bahwa X1 secara parsial berpengaruh terhadap Y, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur $PYX_1 = 0,178$. Sehingga besar pengaruh *earning performance* (X1) secara parsial terhadap

kemandirian daerah (Y) dapat dihitung sebesar $[(0,178)^2 \times 100\%] = 3,1\%$. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini sejalan dan dapat mendukung teori dengan prosentase yang kecil bahwasanya *earning performance* berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengaruh Parsial X2 Terhadap Y

Hipotesis ketiga (H3), yaitu pengaruh parsial proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y), dirumuskan sebagai berikut:

H03: $PYX_2=0$; Proporsi PAD tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

HA3: $PYX_2 \neq 0$; Proporsi PAD berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil pengujian melalui aplikasi SPSS versi 15.0 diketahui bahwa nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen ditunjukkan oleh *output coefficients* pada kolom *standardized coefficients (beta)*. Nilai koefisien jalur pengaruh parsial proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y) adalah 0,908 atau tidak sama dengan nol ($PYX_2 \neq 0$). Berdasarkan hipotesis ketiga (H3) bahwa kriteria untuk menyatakan bahwa variabel independen berupa proporsi PAD secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen berupa kemandirian daerah adalah pada saat $PYX_2 \neq 0$. Hal ini berarti hipotesis nol ketiga (H03) ditolak, dan hipotesis alternatif ketiga (HA3) tidak dapat ditolak atau *not rejected*. Dengan kata lain, proporsi PAD secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur pengaruh parsial proporsi PAD (X2) terhadap kemandirian daerah (Y) pada kolom *standardized coefficients (beta)* yakni $PYX_2 = 0,908$.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga,

maka proporsi PAD (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Y) dengan ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur pada kolom *standardized coefficients (beta)* yakni $PYX_2 = 0,908$. Sehingga besar pengaruh proporsi PAD (X2) secara parsial terhadap kemandirian daerah (Y) dapat dihitung sebesar $[(0,908)^2 \times 100\%] = 82,4\%$. Hal tersebut berarti hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan terdapat pengaruh proporsi PAD secara parsial terhadap kemandirian daerah sebesar 82,4%, telah sesuai atau sejalan dalam menjelaskan dan mendukung teori.

Pengaruh Variabel Lain Terhadap Kemandirian Daerah

Hasil pengujian melalui SPSS 15.0 menunjukkan bahwa pengaruh *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-sama terhadap kemandirian daerah (Y) adalah tidak sama dengan nol ($R^2 \neq 0$). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dari *R square* adalah 0,897 atau $R^2 = 89,7\%$. Dengan menggunakan rumus $\epsilon = 1 - R^2$ maka diketahui perhitungan sebagai berikut:

$$\epsilon = 1 - 89,7\%$$

$$\epsilon = 10,3\%$$

Hal ini berarti bahwa *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) secara bersama-sama mempengaruhi kemandirian daerah (Y) sebesar 89,7% sedangkan variabel-variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel dependen berupa kemandirian daerah adalah sebesar 10,3%. Hal ini berarti juga bahwa sebesar 89,7% variabel dependen berupa kemandirian daerah (Y) dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel independen berupa *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2). Sisanya sebesar 10,3% kemandirian daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan dari penelitian tentang *earning performance* (X1) dan proporsi PAD (X2) dalam mempengaruhi kemandirian daerah (Y), adalah sebagai berikut:

- 1) *Earning performance* dan proporsi PAD secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemandirian daerah di Jawa Tengah sebesar 89,7%.
- 2) *Earning performance* secara parsial mempengaruhi tingkat kemandirian daerah di Jawa Tengah sebesar 3,1%.
- 3) Proporsi PAD secara parsial mempengaruhi tingkat kemandirian daerah di Jawa Tengah sebesar 82,4%.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan kepada seluruh pemda pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota agar dapat senantiasa berusaha meningkatkan PADnya pada tahun-tahun selanjutnya mengingat PAD merupakan komponen penting dalam mengukur tingkatan kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, M. (2006). *Pengaruh arus kas bebas, set kesempatan investasi dan financial leverage terhadap manajemen laba*. (Disertasi tidak diterbitkan). Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Astuti, E. S., & Haryanto, J. T. (2006). Kemandirian daerah sebuah perspektif dengan metode path analysis. *Manajemen Usahawan Indonesia*, XXXV(4), 45-54.
- BPK. (2011). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2011*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2012). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2012*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2013). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2013*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2014). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2014*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2015). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2016a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2016b). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016c). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016d). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016e). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016f). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016g). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016h). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016i). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak*. Semarang: BPK.

- BPK. (2016j). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016k). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016l). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016m). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016n). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016o). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016p). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016q). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016r). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016s). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016t). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016u). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016v). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016w). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016x). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016y). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016z). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukaharjo*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016aa). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016bb). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016cc). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016dd). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan*

- Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016ee). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016ff). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016gg). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016hh). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016ii). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016jj). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal*. Semarang: BPK.
- BPK. (2016kk). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: BPK.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2001). *Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Keban, T. Y. (2008). "Good Governance" dan "Capacity Building" sebagai indikator utama dan fokus penilaian kinerja pemerintah. Diakses pada 8 Desember 2016. https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias_20091015151431_2389_0.pdf.
- Li, C. C. (1975). *Path analysis: A primer*. Pacific Grove, CA: Boxwood Press.
- Loether, H. J. & McTavish, D. G. (1993). *Descriptive and inferential statistics: An introduction*. 4th Edition. Singapore: Allyn and Bacon.
- Prasetya, G. E. (2005). *Penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Santoso, S. (2002). *Buku latihan SPSS statistik multivariat*. Edisi II. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. (2007). *Analisis laporan keuangan daerah*. Cetakan Pertama. Tangerang.
- Soepomo, M. (2007). *Redefinisi akuntan sektor publik dalam upaya penciptaan good government*. Makalah Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta.

